

POLA KEBIJAKAN DALAM SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN PERKOTAAN

Oleh: Entjeng, S. Sos.¹⁾

Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh sistem manajemen pengelolaan perkotaan, sehingga dapat dicari pemecahannya untuk dijadikan bahan rekomendasi dalam perbaikan pola kebijakan dalam sistem manajemen pengelolaan perkotaan di masa mendatang. Tulisan pola kebijakan dalam sistem manajemen pengelolaan perkotaan dengan memfokuskan pada beberapa permasalahan yaitu : masalah sosial dan kependudukan, urbanisasi dan sektor informal, pembangunan sarana dan prasarana, peluang dan sistem manajemen dan kebijakan yang terpadu.

Dalam rangka menyiapkan subsistensi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan, disini akan dikemukakan pola kebijaksanaan dalam sistem manajemen pengelolaan perkotaan. Dalam pengelolaan perko-

taan ada tiga masalah dalam sistem manajemen perkotaan dan kebijakan pemerintah serta implikasinya pada penyediaan utilitas, aksesibilitas, fasilitas dan amenitas perkotaan

Jumlah Penduduk tiap kotamadya dan Kabupaten Tabel 2

No	Kodya dan Kabupaten	Kota	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Luas Wilayah
1	Kodya	Bandung	2.197.736	1.095.600	1.102.136	
2	Kodya	Bogor	288.700	152.400	136.300	
3	Kodya	Sukabumi	122.112	61.063	61049	
4	Kodya	Cirebon	258.209	132.495	125.714	
5	Kabupaten	Serang	1.570.617	794.818	775.799	
6	Kabupaten	Ciamis	1.208.589	747.016	461.573	
7	Kabupaten	Tasik	1.894.732	954.660	940.072	
8	Kabupaten	Karawang	1.556.700	777.100	779.600	
9	Kabupaten	Indramayu	1.497.746	752.521	745.225	
10	Kabupaten	Pandeglang	909.305	458.003	451.302	

Hasil Sensus Penduduk Tahun 1998

1) Staf pada PKDA I LAN dan dosen STIA LAN Bandung

Aksesibilitas meliputi prasarana jalan, lalu lintas dan transportasi serta faktor yang berhubungan dengan lainnya yang dapat menjamin gerak penduduk kota dalam sehari-hari guna memenuhi segala kebutuhannya dari tempat tinggal mereka ketempat-tempat kegiatan dan sebaliknya. Fasilitas menyangkut berbagai sarana guna memenuhi atau melayani kehidupan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, ibadah dan sebagainya sedangkan amenities me-nyangkut segala sarana untuk rekreasi, hiburan, olah raga dan lain-lain yang diperlukan untuk mengisi waktu dan santai. Daerah yang relatif terbatas.

A. MASALAH SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

Kota adalah suatu dominan dengan penduduk yang relatif padat dan luas.

Dominan ini adalah suatu space sebagai hasil interaksi antara sistem sosial dan sistem lingkungan dengan sistem administrasi kewenangan serta mekanisme yang dinamis berlaku dalam wilayah menurut perjalanan waktu. Dalam dominan perkotaan terdapat watak yang khas dan berbeda dengan dominan wilayah yang bukan perkotaan.

Jumlah Penduduk tiap tiap kotamadya dan Kabupaten Tabel I

No	Kodya dan Kabupaten	Kota	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Luas Wilayah
1	Kodya	Bandung	2.197.736	1.095.600	1.102.136	
2	Kodya	Bogor	278.700	141.400	137.300	
3	Kodya	Sukabumi	122.012	61.053	60.959	
4	Kodya	Cirebon	258.209	122.495	135.714	
5	Kabupaten	Serang	1.547.617	791.818	755.799	
6	Kabupaten	Ciamis	1.505.972	737.016	451.573	
7	Kabupaten	Tasik	1.844.732	914.660	930.072	
8	Kabupaten	Karawang	1.536.700	767.100	769.600	
9	Kabupaten	Indramayu	1.478.746	742.521	735.225	
10	Kabupaten	Pandeglang	889.305	448.003	441.302	

Hasil Sensus Penduduk Tahun 1993

Jumlah Penduduk tiap tiap kotamadya dan Kabupaten Tabel 3

No	Kodya dan Kabupaten	Kota	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Luas Wilayah
1	Kodya	Bandung	2.397.736	1.195.600	1.202.136	
2	Kodya	Bogor	298.707	151.401	147.306	
3	Kodya	Sukabumi	126.015	64.056	61.959	
4	Kodya	Cirebon	258.309	122.495	135.714	
5	Kabupaten	Serang	1.547.617	791.818	755.799	
6	Kabupaten	Ciamis	1.188.589	737.016	451.573	
7	Kabupaten	Tasik	1.834.732	914.660	920.072	
8	Kabupaten	Karawang	1.536.789	767.109	769.680	
9	Kabupaten	Indramayu	1.479.846	742.621	737.225	
10	Kabupaten	Pandeglang	909.609	468.003	441.606	

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2003

Walaupun demikian kota cenderung tumbuh dan berkembang lebih cepat dari daerah sekelilingnya sehingga lebih menarik bagi pendatang dari luar kota serta mendorong arus urbanisasi yang selalu menimbulkan persoalan baru. Gejala pertumbuhan dan pemekaran wilayah kota yang lebih cepat ternyata telah menimbulkan berbagai benturan nilai-nilai sosial sehingga memerlukan sistem administrasi, wewenang, yuris-diksi dan dinamisasi yang berbeda dengan wilayah bukan perkotaan.

Penduduk perkotaan di Indonesia sudah semakin besar seperti terlihat dari hasil sensus penduduk tahun 1998 dari penduduk 240 473 570 orang

(69 %) tinggal di daerah perkotaan suatu peningkatan cukup berarti jika dibandingkan dengan sensus tahun 2003 persentase penduduk perkotaan akan mengalami naik lebih tinggi lagi yaitu sekitar 73 %.

Kepadatan penduduk dalam wilayah perkotaan dengan nilai-nilai sosialnya membawa implikasi yang berbeda pula dalam pengelolaan atau manajemen perkotaan. Pola umumnya semakin banyak fungsi (predikat) yang dipikul suatu kota semakin besar pula dipikul pula daya tariknya bagi penduduk luar kota. Contohnya Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yaitu pusat Pemerintahan, pusat perdagangan, pusat Industri, Pusat Parawisata, Pusat Kebudayaan, dan pusat - pusat

lainnya yang pada gilirannya menjadikan pertumbuhan dan perkembangan Kota Jakarta seolah-olah tak terkendali.

Disamping daya tarik itu ada pula daya dorong (pushed factor) daerah pedesaan, karena kesulitan hidup mendorong penduduk pedesaan pergi ke kota yang seakan-akan menjanjikan untuk hari esok yang lebih baik. Kota yang berbudaya tarik lebih besar akan memperbesar tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, sehingga mengakibatkan membengkaknya tuntutan kebutuhan (excess demand) ini juga disebabkan belum sesuai dengan nilai-nilai persyaratan norma kehidupan perkotaan. Karena itu manajemen perkotaan selalu menghadapi lingkaran setan.

Bila diadakan pemenuhan tuntutan kebutuhan maka kota akan jadi lebih menarik lagi bagi pendatang baru, nanti pada giliran pendatang baru akan menuntut kebutuhan menjadi lebih tinggi dan seterusnya. Akibat berantai ini tercermin pada masalah pedagang kaki lima, pedagang asongan akan menimbulkan kemacetan lalu lintas, tenaga kerja, gubuk liar dalam berbagai ketimpangan yang ada.

Walaupun demikian lingkaran setan tersebut harus dapat dijawab oleh manajemen perkotaan dalam bentuk pelayanan umum, langsung atau tidak langsung. Kebijakan manajemen langsung dalam pemerintahan dapat berupa anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBD dan APBN) yang dialokasikan untuk menyediakan utilitas, aksesibilitas, fasilitas dan amenitas kota. Sedangkan kebijakan tidak langsung

dapat berupa berbagai pengaturan yang akan membebaskan kemudahan kepada masyarakat berupa perizinan ataupun larangan untuk kepentingan yang lebih umum.

Persoalan dalam pengelolaan kota adalah masalah pertanahan dan tata kota. Persoalan ini yang sering tidak tuntas dan tidak terselesaikan menyebabkan perkotaan yang mempunyai daerah terbatas dengan jumlah penduduk yang besar. Sementara itu kegiatan masyarakat selalu memerlukan lahan tanah dengan persyaratan-persyaratan tata kota tertentu. Semakin tinggi tingkat perkembangan kota, semakin besar pula tuntutan akan kebutuhan tanah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Akibatnya semakin banyak kepentingan yang terlihat dalam masalah pertanahan di perkotaan yang bisa berakar pada tiga faktor utama yaitu:

1. *Status tanah berupa hak-hak atas tanah;*
2. *Masalah peruntukan tanah (land use) dengan tata kotanya; dan*
3. *Masalah harga tanah dengan segala "nilai tambahnya "*

Ketiga faktor inilah kunci penyelesaian masalah pertanahan. Tetapi justru, karena berbagai kepentingan tertentu dalam ketiga faktor tersebut sering tidak jelas dan tidak diselesaikan oleh pemerintah. Masalah lain yang menonjol dalam perkotaan adalah soal perumahan dan lingkungan hidup. Selain dari meningkatnya kebutuhan secara kuantitas maupun kualitas perumahan di

perkotaan memerlukan penataan tertentu agar serasi dengan lingkungannya.

Karena itu faktor kemampuan dan nilai-nilai sosial yang kurang mendukung untuk tujuan yang telah ditentukan. Menurut kantor Propinsi Jawa Barat berdasarkan hasil survey penduduk pada tahun 1998 rata-rata 30 % pengeluaran rumah tangga diperuntukan bagi sektor perumahan yakni untuk pembelian, angsuran, sewa rumah dan perbaikan rumah. Tingkat pertumbuhan pengeluaran ini rata-rata 13 % pertahun.

Melihat besarnya pengeluaran rumah tangga bagi sektor perumahan ini, maka pembangunan perumahan perkotaan merupakan sasaran bisnis yang cukup menarik. Namun demikian tingkat pendapatan penduduk pada umumnya terutama golongan menengah ke bawah belum cukup memadai, bahkan dengan cicilan jangka panjang sekalipun. Inilah kendala utama pembangunan perumahan yang lebih baik dan lebih sehat serasi dengan lingkungannya bagi golongan menengah ke bawah yang merupakan mayoritas penduduk kota.

Sementara para pengusaha perumahan (developer) lebih tertarik menyediakan rumah-rumah mewah dikota-kota besar, aki-batnya masih muncul daerah kumuh dan gu-buk liar yang kian mencolok dan meluas dite-ngah-tengah gedung yang mencakar langit.

Karena keragaman penduduk perkotaan, konflik nilai, kesulitan hidup, maupun kesenjangan sosial ekonomi, tekanan terhadap lingkungan hidup

makin menonjol. Polusi perkotaan yang lebih banyak disebabkan ketimpangan sosial akan semakin menonjol bila kebijakan penanggulngannya tidak dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

B. URBANISASI DAN SEKTOR INFORMAL

Daya tarik kota telah menimbulkan arus urbanisasi berlebihan. Salah satu diantaranya adalah penumpukan besar-besaran tenaga kerja dan tumbuhnya berbagai kegiatan usaha informal. Tenaga kerja yang terbawa arus urbanisasi ini pada umumnya berbekal pendidikan dan keahlian yang terbatas sesuai dengan kesempatan dan fasilitas yang terbatas pada tempat tinggal. Sementara itu lapangan kerja yang ditawarkan di perkotaan yang terutama di kota-kota besar sudah berlaku dan bermutu tinggi serta menjurus kepada pengkhususan sesuai dengan tingkat kemajuan ekonomi dan teknologi yang ada. Akibatnya timbul kesenjangan antara lapangan kerja yang ditawarkan, kesenjangan ini menyebabkan tingginya tingkat pengangguran serta tumbuhnya usaha-usaha informal yang acapkali menyulitkan manajemen perkotaan.

Tetapi masalah pengangguran di perkotaan bukan semata-mata kurangnya lapangan kerja, melainkan juga karena tidak sesuaiinya lapangan kerja yang ditawarkan dengan mutu tenaga kerja yang ada. Kesenjangan ini ditunjukan dengan menjamurnya berbagai kursus atau pendidikan non formal serta larisnya usaha-usaha pelatihan dalam berbagai sektor kegiatan di perkotaan.

C. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

Semakin majunya suatu perkotaan, semakin modern kehidupan penduduknya dan semakin tinggi pula tuntutan dan semakin beragam jenis kebutuhan masyarakat sarana dan prasarana. Di Negara-negara berkembang, karena kemajemukan sosial, kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan sarana dan prasarana itu menjadi lebih pelik lagi. Pekerjaan sarana dan prasarana sering masih di bawah standar Internasional, sementara itu pembangunan sarana dan prasarana ini kurang didukung budaya yang sesuai untuk memakai dan memeliharanya sehingga masa pakai dan pelayanannya menjadi kadaluwarsa.

Persoalan kesenjangan budaya ini semakin rumit ketika tuntutan dan kebutuhan akan sarana dan prasarana terus meningkat tinggi tetapi dana dan daya yang tersedia sangat terbatas. Keterbatasan dana dan daya ini semakin terasa karena ada kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang terpadu bagi pengadaan, pembinaan dan pemeliharaan. Akibatnya yang sering terjadi di lapangan adalah ketidakefisienan pembiayaan seperti dalam pembiayaan berbagai proyek galian jalan.

Semua masalah ini merupakan kendala umum bagi manajemen perkotaan, karena tuntutan masyarakat terus berkembang sedangkan pelayanan cenderung lambat. Disatu pihak seperti eksponensial permintaan akan pelayanan seperti perizinan, kebersihan, transportasi dan lain-lainnya meningkat tetapi dipihak

lain penerimaan keuangan dan daya serap anggaran pemerintah sangat terbatas. Kendala lain adalah sifat menyarakat perkotaan lebih individualistis, keperdulian sosial yang rendah dan sifat alineasi masyarakat perkotaan serta hubungan spasial yang lebih menonjol ketimbang hubungan ketetanggaannya.

“ Hasil penelitian ini ditulis oleh Bun Yamin Ramto tentang perumahan di wilayah DKI Jakarta pada tahun 1990, dengan mengambil kelompok rumah tangga sebagai target kepentingan menunjukkan bahwa selain aspek tata ruang (lokasi) dan lingkungan hidup, aspek utilitas, aksesibilitas, fasilitas dan amenitas merupakan peringkat utama kebutuhan. Utilitas meliputi semua kebutuhan rumah tangga seperti penyediaan air minum, sanitasi, listrik, telepon dan kebutuhan rumah tangga lainnya “.

D. PELUANG DAN SISTEM MANAJEMEN

Masalah kota yang sedemikian kompleks dengan pertumbuhan dan pengembangan yang cepat sangat memerlukan perencanaan yang lebih terpadu agar pertumbuhan dan pengembangannya menjadi lebih terarah, lebih baik, seimbang dan serasi dengan tuntutan penduduk perkotaan. Atas dasar perencanaan ini sudah diatur pemerintah baik dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, pengganti UU. Nomor. 5 Tahun 1974 maupun dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Namun demikian yang sampai sekarang belum juga keluar adalah Undang-Undang Tata Ruang, Undang-Undang Tata Guna Tanah dan Undang-Undang Bina kota. Sedangkan Undang-Undang Nomor. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang secara bersamaan diperlukan sebagai landasan perencanaan kota.

“ Dasar hukum dari kebijakan pengelolaan perkotaan dimulai dari UUD, 1945 itu sendiri yaitu pada Pasal 18 dan penjelasannya, khususnya yang menyangkut pembagian daerah, baik daerah yang bersifat otonom maupun yang bersifat administrasi.

Dengan sistem perencanaan yang terpadu dan berjenjang secara bertahap menurut kurun waktu masing-masing ini maka dalam pelaksanaannya diperlukan sistem pengendalian yang terpadu dan berjenjang pula termasuk keterpaduan antar instansi atau departemen pemerintahan. Keterpaduan pengendalian ini dimaksudkan agar semua keinginan dapat ditampung dan permasalahan dapat dipecahkan, wahana dan sarana dapat disediakan sementara dana dan daya serta kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran perencanaan tersebut di atas dapat memenuhi prinsip kehematan ekonomi berhasil guna efektif dan berdaya guna efisien. Dengan demikian produktivitas manajemen kota dapat diwujudkan.

Selain berbagai kendala, kota juga mempunyai berbagai potensi untuk dikembangkan serta peluang untuk

mengatasi berbagai masalah. Secara umum wilayah perkotaan mempunyai relatif lebih banyak sumberdaya manusia yang lebih tinggi kualifikasi keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembinaan kota. Disamping berbagai sumber dana konvensional yang sudah ada, sumber daya alam terutama tanah yang terbatas juga sangat potensial untuk dijadikan sumber dana yang dibutuhkan untuk manajemen kota. Yang masih perlu direkayasa adalah sumber daya buatan seperti kewenangan (authority) yurisdiksi (dasar hukum) partisipasi dan teknologi termasuk informasi. Sumber daya buatan ini dapat digunakan untuk mengadakan lompatan (overcome) atau terobosan (breakthrough) untuk dapat menyelesaikan segala permasalahan kota, yang seolah – olah tidak terselesaikan.

Kemungkinan untuk mengadakan rekayasa ini justru besar sekali, karena dapat ditunjang oleh faktor-faktor yang sangat potensial yang hanya dimiliki oleh wilayah perkotaan, yakni pertama walaupun kondisi objektif kota mempunyai daerah yang relatif kecil dan terbatas tetapi kota lebih mudah untuk diawasi dan dikuasai perubahan-perubahannya. Kedua potensi ekonomi masyarakat relatif lebih besar, sehingga kreativitas masyarakat khususnya yang bermotif bisnis akan lebih cepat tanggap. Ketiga permintaan pasar komoditi konsumsi dan jasa yang cukup tinggi sehingga penawaran dan perdagangan menjadi lebih hidup. Keempat teknologi dan tenaga terampil relatif lebih banyak berada di perkotaan, sehingga dukungan terhadap pemecahan masalah lebih besar kemungkinan.

Kelima sebagai alternatif sifat gotong royong pada masyarakat pedesaan di perkotaan potensi dan partisipasi wajib pajak dan retribusi lainnya lebih tinggi. Keenam pola hidup lebih dinamis, sehingga lebih tanggap dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

Dengan segala potensi ini sesungguhnya manajemen kota dapat menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pemberian kemudahan dalam pelayanan. Sifat gotong royong masyarakat yang tadinya berlaku di daerah pedesaan yang dapat dikerahkan untuk mengerjakan berbagai kegiatan dari dan untuk masyarakat sendiri, sekarang di daerah perkotaan dapat diubah dan diarahkan dalam bentuk partisipasi mereka pada kewajiban melunasi pajak dan retribusi atas dasar kemudahan dan pelayanan yang lebih baik.

Keuntungannya bagi masyarakat dapat diberikan melalui realokasi anggaran pembangunan, baik yang dikerjakan sendiri oleh pemerintah seperti sarana dan prasarana kota berupa utilitas, aksesibilitas, fasilitas dan amenitas kota, maupun pada sektor-sektoryang dapat dilepaskan oleh pemerintah untuk dikerjakan oleh swasta. Peran swasta tampaknya akan mendapatkan porsi yang semakin tinggi terutama untuk kota-kota dengan katagori besar dan maju, karena kemampuan manajemen kota yang seperti itu mempunyai kecenderungan yang semakin menurun, sedangkan tuntutan kebutuhan masyarakat justru akan menjadi semakin besar dan kompleks.

Salah satu faktor untuk keberhasilan manajemen perkotaan adalah perlunya dinamisasi menurut perjalanan waktu. Sikap yang statis dalam manajemen kota akan membawa permasalahan yang dihadapinya seakan-akan tak terpikul lagi dan penyimpangan (deviasi) akan semakin besar. Oleh sebab itu evaluasi dalam sistem manajemen kota perlu lebih dihidupkan dan perlu lebih dinamik lagi, baik terhadap permasalahan, perencanaan, administrasi, maupun organisasi. Kalau tidak manajemen kota cenderung bersifat rutin belaka dan tidak akan mampu menjawab tantangan kehidupan perkotaan itu sendiri.

E. KEBIJAKAN YANG TERPADU

Pada dasarnya, untuk menghadapi masalah sosial dan perkembangan penduduk dengan segala tuntutan diperlukan perbaikan dalam sistem manajemen perkotaan sehingga lebih terencana dan terpadu. Harus diakui dari uraian di atas kebijakan yang berada di bawah GBHN belum sepenuhnya diatur secara terpadu, baik antara pusat dan daerah maupun antara sektor dengan sektor lainnya, sehingga implementasinya pun tidak terpadu serta tidak konsisten denganyang diamanatkan GBHN itu sendiri. Berdasarkan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi ini selanjutnya disusun dan dirumuskan kebijakan manajemen perkotaan yang lebih bawah seperti peraturan daerah (Perda), Keputusan Kepala Wilayah dan sebagainya. Selain keharusan menaati pedoman kebijakan yang lebih atas tadi perlu diperhatikan berbagai kepentingan yang

sedang dan akan berkembang serta hidup di tengah tengah masyarakat perkotaan.

Kepentingan masyarakat juga bersifat sangat kompleks sehingga terjadi tumpang tindih dan ketegangan kepentingan (conflicts of interests) serta berbagai kepentingan. Tetapi semua kepentingan tersebut perlu diakommodasikan dalam pengambilan keputusan-kebijakan pemerintah. Karena kondisi masyarakat juga bersifat sangat dinamis, maka kebijakan manajemen perkotaan harus bersifat dinamis. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan kota, kebijakan manajemen selalu perlu dievaluasi dan dirumuskan berbagai kebijakan baru. Dalam perumusan kebijakan maka perlu selalu diperhatikan " realokasi nilai-nilai " kepada rakyat dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu kebijakan pemerintah, tertulis ataupun tidak tertulis pada hakekatnya merupakan realokasi nilai-nilai yang tadinya berasal dari rakyat ditujukan kembali kepada rakyat.

Jadi kebijakan pemerintah itu pada dasarnya merupakan tanggapan pemerintah terhadap tuntutan kebutuhan yang menjadi kepentingan rakyat. Tujuan akhir kebijakan manajemen perkotaan adalah memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang dapat dicapai bila seluruh aparat pemerintah melakukan pelayanan dengan baik dan terpadu.

Dengan demikian kepentingan masyarakat diharapkan dapat ditampung , disalurkan diakomodasikan dan ditransformasikan ke dalam bentuk kebijakan pemerintah dalam mekanisme sistem

administrasi yang terstur, lancar dan tertib. Dalam rangka pola manajemen kota sasaran tertib administrasi, kini banyak dilakukan pemerintah untuk kelancaran penyaluran kepentingan masyarakat, kelancaran perumusan dan evaluasi kebijakan pemerintah juga dapat dilakukan seleksi kepemimpinan yang lebih teratur dan berkepastian. Perencanaan dan pengendalian pun dapat dilakukan dengan lebih lancar terpadu dan berke-lanjutan sehingga tertiblah pemerintahan yang pada akhirnya bermuara pada tertib kehidupan sosial karena kepentingan mereka telah diperhatikan dan ditanggapi dengan baik.

Kebijakan pemerintah yang terpadu mempunyai tiga dimensi yang pertama adalah terpadu secara vertikal. Artinya antara kebijakan yang lebih atas dan kebijakan di bawahnya, baik sektoral maupun regional ada hubungan konsisten dan komplementer, sehingga dapat saling mengisi dan saling menunjang guna pemecahan masalah. Kedua terpaduan horizontal dalam arti semua kebijakan sektoral dan kebijakan regional pada satu tingkatan harus dapat saling menunjang dan saling membantu secara fungsional demi tujuan bersama yang lebih besar yaitu memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Ketiga keterpaduan diagonal berupa keterpaduan antara kebijakan sektoral yang lebih tinggi dan kebijakan regional di bawahnya atau sebaliknya anatara kebijakan regional yang lebih tinggi dengan sektoral di bawahnya. Ketiga dimensi keterpaduan dalam kebijakan pemerintah ini sampai sekarang masih sulit untuk diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Manning, Chris dan Noer Effendi Tadjudin, Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota, Pusat Penelitian dan Study Kependudukan UGM, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991.
- Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi Yogyakarta, 2002.
- Manan, Bagir, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Syafrudin, Ateng, Pengaturan Koordinasi Pemerintah di Daerah, Penerbit PT. Citra Anditya Bakti, Bandung, 1993
- Kartasasmita, Ginandjar, Pembangunan Untuk Rakyat, CIDES, Jakarta, 1996
- Cook, Sarah and Steve Macaulay, Perfect Empowerment. Pemberdayaan yang Tepat. Alih Bahasa: Tyas, Puloepi. Jakarta :P.T. Elex Media Komputindo, 1997.
- Deverye, Catherine, Good Service is Good Business, 7 Strategi Sederhana Menuju Sukses. Alih Bahasa : Prihminto M, Widodo, Jakarta, Gramedia, 1997.

2. Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998, Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.